

## **ABSTRACT**

This research is aimed to analyze the influence PAD, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, DBH, and the Capital Expenditure Per Capita Income. Capital expenditure has an important role in running the government system is to improve the welfare of the public.

The sample used in this research is data PAD, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, DBH, income per capita (GDP) in the city / district of Central Java. Observation data from January 2011 to December 2014. Analysis tool used is Multiple Regression Test.

The results of this study indicate that the Local Revenue and the General Allocation Fund positive effect on Capital Expenditure. While the Special Allocation Fund, DBH, and income per capita does not significantly influence Capital Expenditure.

**Keywords:** PAD, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, DBH, Per Capita Income, Capital Expenditure.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Perkapita terhadap Belanja Modal. Belanja Modal mempunyai peranan penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan publik.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Perkapita (PDRB) di Kota / Kabupaten Jawa Tengah. Data Pengamatan mulai Januari 2011 sampai Desember 2014. Alat Analisis yang digunakan adalah Uji Regresi Berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Perkapita, Belanja Modal.

## INTISARI

Di Indonesia, desentralisasi fiskal mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintahan orde baru. Dalam perkembangan bangsa Indonesia pada masa orde baru berbagai kebijakan seperti sentralisasi diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal secara resmi berlaku mulai 1 Januari 2001 berdasarkan UU RI No. 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan RI No.32 tahun 2004. Menurut UU No.32 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi : Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak (BHP), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemerintah daerah harus dapat meningkatkannya untuk membiayai kegiatan pembangunan, namun di era desentralisasi fiskal harapan itu belum optimal yang tercermin di dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

Hasil – hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Handayani Elva Nuraina (2012), Riski Ramayani (2012), Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), Arbie Gugus Wandira (2013), David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007). Menarik bagi peneliti untuk menguji kembali Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Daerah Propinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014, adapun jumlah sampel yang diperoleh menggunakan metode *purposive sampling* seluruh. Analisis yang digunakan adalah dengan uji t (uji parsial)

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Perkapita dalam menjelaskan atau mempengaruhi Belanja Modal pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 65,8%. Hasil penelitian ini memberikan panduan terhadap seluruh pengguna dimaksudkan akan mampu menggambarkan secara keseluruhan mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH dan pendapatan perkapita terhadap belanja modal.